

Reintegrasi Purna-Migran: Analisis Peran Beranda Migran melalui Pendekatan Feminisme Institusional

Sayyidul Mubin, Muhammad Adel Aditya Abdullah, Zaid Asidik Pua Jiwa

*Corresponding author: hail.sayyidul@gmail.com

^{1,2,3}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v11i3.41266

Abstract

The reintegration of post-migrant women in Indonesia has complex challenges where there are policies from the government that are still economic-centric. This study aims to analyze how the role of the social and humanitarian organization Beranda Migran in carrying out its programs in the realm of reintegration of post-migrant women in Indonesia using an institutional feminism approach. The analysis was processed using qualitative methods with interviews with the Beranda Migran and library research of journal articles and related reports. This study found that the BPPMI No.6 of 2023 article reflects a maculin bias which in this case ignores the complexity of the problems of retired migrant women. The problems present such as social stigma, family relationship fractures, psychological trauma, and the lack of recognition of skills certification of retired migrants. The response of the Beranda Migran in this case is through a participatory grassroots approach, facilitating the formation of KOPPMI, and deconstructing the branding of the "Pahlawan Devisa" which perpetuates the commodification of migrant workers. Successful reintegration requires a holistic approach with gender considerations through a retire-based civil society as an alternative to the limited approach of gender-biased government institutions

Abstrak

Reintegrasi perempuan purna-migran di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks dimana terdapat kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang masih bersifat ekonomi-sentris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dari organisasi sosial-kemanusiaan Beranda Migran dalam menjalankan program-programnya dalam ranah reintegrasi purna-migran perempuan di Indonesia menggunakan pendekatan feminisme institusional. Analisis diolah menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dengan Beranda Migran dan *library research* artikel jurnal dan laporan terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan BPPMI No.6 Tahun 2023 mencerminkan bias makulin yang dalam hal ini mengabaikan kompleksitas permasalahan perempuan purna-migran. Permasalahan-permasalahan yang hadir seperti stigma sosial, keretakan hubungan keluarga, trauma psikologis, dan tidak diakuinya sertifikasi keterampilan para purna migran. Respon Beranda Migran dalam hal ini melalui pendekatan *grassroot* yang partisipatif, memfasilitasi pembentukan KOPPMI, serta mendekonstruksi branding dari "Pahlawan Devisa" yang mana melanggengkan komodifikasi pekerja migran. Reintegrasi yang berhasil memerlukan pendekatan holistik dengan pertimbangan gender melalui *civil society* berbasis purna-migran sebagai alternatif keterbatasan pendekatan dari institusi pemerintah yang bias gender.

Keywords

Beranda Migran, Feminisme Institusional, Purna-Migran, Reintegrasi

Article History

Received August, 21
Revised November, 30
Accepted December, 17
Published December, 18

Corresponding Author

Sayyidul Mubin
Dept. Hub. Internasional
Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur,
Yogyakarta, 55281

Pendahuluan

Migrasi penduduk pada tempat satu ke tempat lain merupakan sebuah fenomena yang akan selalu terjadi dalam kehidupan, terlebih lagi dengan tuntutan sosial, ekonomi, politik, budaya bahkan keamanan. Masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dikarenakan beberapa faktor tersebut, dan akan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, arus migrasi manusia akan semakin meningkat pula (Yusitarani, 2020). Namun, berkembangnya arus migrasi baik keluar, maupun mereka yang kembali, tidak sejalan dengan bagaimana negara memperlakukan mereka. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, seringkali mengalami permasalahan-permasalahan baik secara teknis, maupun secara kebijakan. Ketika mereka sudah selesai kontrak, dan kembali ke Indonesia, sayangnya hal-hal yang diimpikan oleh para PMI mengalami berbagai dinamika permasalahan yang komprehensif. Masalah menjadi semakin kompleks ketika mayoritas mereka yang bekerja di luar negeri ialah para perempuan, karena mereka rentan untuk menjadi korban dari adanya permasalahan-permasalahan yang ada.

Hal ini menjadi perhatian dari organisasi Beranda Migran, di mana organisasi ini berfokus pada perlindungan para perempuan yang memang bekerja di luar negeri. Organisasi ini didirikan pada tahun 2022, dan didirikan sekretariatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman. Alasan didirikannya sendiri ialah karena maraknya pelanggaran serta kekerasan terhadap para pekerja migran Indonesia, khususnya para PMI perempuan. Fenomena-fenomena ini yang membentuk semangat dari NGO (Non-Governmental Organization) ini untuk menyuarkan suara-suara dan aksi-aksi kemanusiaan yang bertujuan menegakkan keadilan serta hak para perempuan migran Indonesia.

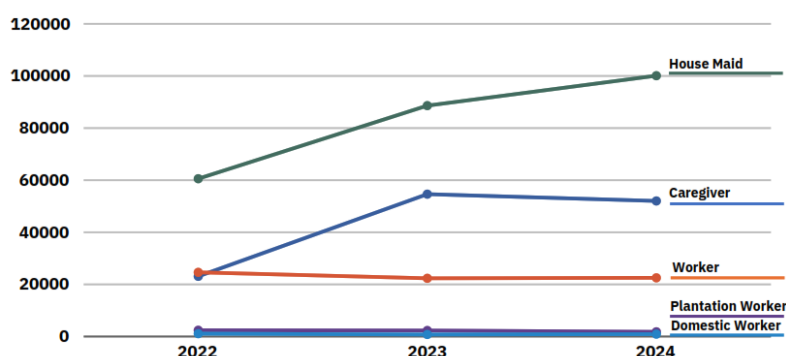
Beranda Migran sebagai sebuah NGO yang bergerak dalam *grassroots movement* sangat cocok dalam kontekstualisasi nilai-nilai dari feminisme liberal khususnya dalam mengadvokasi komunitas yang termarginalkan dalam hal ini ialah pekerja migran perempuan. Upaya dari Beranda Migran menjadi refleksi bagaimana sebuah gerakan yang fokus dalam tantangan yang dihadapi perempuan yang berbeda-beda pula latar belakangnya. Reintegrasi yang diupayakan oleh beranda migran kepada purna pekerja migran Indonesia perlu advokasi yang terarah dan inklusif, karena mereka menghadapi purna migran yang memiliki masalah yang beragam.

Secara institusional, organisasi Beranda Migran merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Walaupun memiliki kantor atau sekretariat di Yogyakarta, Beranda Migran memiliki cakupan kerja yang lebih luas, baik secara lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, maupun di tingkat nasional dan Internasional. Fokus dari organisasi ini ialah para migran dan purna migran yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan di negara tujuan, dan Beranda Migran juga mengurus reintegrasi purna migran di Indonesia. Memang, Beranda Migran memiliki *concern* yang lebih terhadap migran perempuan, hal ini dikarenakan para perempuan rentan untuk menjadi objek kekerasan baik fisik maupun non-fisik.

Organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang migran ini sebenarnya cukup banyak, karena dalam konteks regionalisme di kawasan Asia Tenggara di mana terdapat “feminisasi migrasi tenaga kerja” yang mana implikasinya cukup signifikan terutama di bidang domestik seperti pekerja rumah tangga (Elias, 2010). Adanya fenomena ini menjadi tren yang lebih luas lanskapnya, di mana partisipasi perempuan kelas menengah dalam pasar kerja, kurangnya sistem yang baik dalam memonitor kesejahteraan para pekerja migran, serta ekspektasi sosial yang ada.

Tantangan yang hadir, dan memang kurang diperhatikan oleh pemerintah ialah bagaimana para pekerja migran perempuan yang sudah menyelesaikan kontraknya ini bisa kembali kepada masyarakat asalnya di Indonesia (Khasanah et al., 2023; Budiono et al., 2023). Pengembalian pekerja migran ke masyarakat atau dalam hal ini akan penulis sebut sebagai reintegrasi migran menjadi sebuah permasalahan yang kompleks. Selain karena para migran perempuan perlu menyesuaikan bagaimana mereka hidup ke tempat atau masyarakat asal mereka, mereka juga harus menanggung permasalahan-permasalahan berat lain yang memang datang dari eksternal. Permasalahan-permasalahan tersebut yang secara umum akan dibahas dalam sub-bab pembahasan ialah stigma masyarakat kepada purna migran, kekerasan oleh berbagai pihak di tempat asal mereka, permasalahan finansial, permasalahan bagaimana mereka bisa bekerja kembali di tempat asal, hingga bagaimana mereka bisa untuk membaaur dengan masyarakat lainnya.

Grafik. 1 Perkembangan Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia menurut Lima Jabatan dengan Penempatan Terbanyak Tahun 2022 – 2024



Sumber : BP2MI, diakses dari : <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>

Dari data BP2MI di atas, terlihat bahwa memang PMI yang berangkat tiap tahunnya memiliki peningkatan trennya. Peningkatan ini juga terlihat signifikan naiknya dan juga signifikan secara kuantitasnya pada jabatan kerja berupa house maid. House maid disini mayoritas diisi oleh para perempuan, serta posisi kuantitas paling banyak kedua ialah caregiver, yang mana jabatan ini juga didominasi oleh para perempuan.

JENIS KELAMIN	2022	2023	2024	JUMLAH
Laki-Laki	78.643	107.127	96.091	281.861
Perempuan	122.074	189.981	201.343	513.398
Jumlah	200.717	297.108	297.434	795.259

Sumber : BP2MI, diakses dari : <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>

Dari tabel di atas, yang diambil dari laporan BP2MI, mayoritas migran yang keluar bekerja, memang didominasi oleh para perempuan. Data yang ada juga menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun, di mana di tahun 2022 pada jumlah 122.074, dan naik menjadi 201.343, dengan kenaikan yang hampir mencapai 2 kali lipat.

Grafik yang kuantitasnya semakin naik, bagi negara tentu akan melihat besarnya potensi pengembangan dan penempatan pekerja migran kita di luar negeri. Akan tetapi, potensi masalah akan reintegrasi migran juga akan semakin besar. Semakin banyak perempuan yang bekerja di sektor domestik, semakin banyak pula yang akan menghadapi tantangan kompleks saat kembali ke tanah air nantinya.

Dominasi pekerjaan-pekerjaan non-formal bagi pekerja migran Indonesia, khususnya bagi para perempuan di mana mereka mayoritas bekerja sebagai *housemaid* dan *caregiver*. Lebih lanjut, dalam analisis dan pembahasan, penulis akan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pekerja migran juga akan menjadi permasalahan lebih lanjut adanya reintegrasi. Mereka berangkat dengan sertifikat pendidikan formal yang terbatas, maka ketika kembali mereka harus mulai lagi dari nol, dengan berbagai hambatan dan tantangan yang hadir.

Top 5 Negara

Negara	2023	2024	% Perubahan	Proporsi
Hong Kong	88.167	99.773	▲ 13,16% (11.606)	33,54%
Taiwan	83.142	84.581	▲ 1,73% (1.439)	28,44%
Malaysia	72.257	51.723	▼ 28,42% (20.534)	17,39%
Jepang	9.673	12.720	▲ 31,50% (3.047)	4,28%
Singapura	7.883	10.819	▲ 37,24% (2.936)	3,64%
Negara Lainnya	35.986	37.818	▲ 5,09% (1.832)	12,71%

Sumber : BP2MI, diakses dari : <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>

Pada tahun 2023 hingga pada tahun 2024, negara-negara yang menjadi 5 negara besar tujuan PMI didominasi oleh Hongkong, di mana terdapat 99.773 PMI yang terdata oleh BP2MI. kemudian disusul oleh Taiwan, Malaysia, dan Jepang. Walaupun negara-negara ini masih dalam regional benua Asia, namun tentu masing-masing negara memiliki norma dan budaya yang berbeda dengan Indonesia. Ditambah lagi tidak ketatnya regulasi kepada para kontraktor yang akan mengontrak pekerja Indonesia untuk bekerja di negara mereka.

Reintegrasi pekerja migran Indonesia (PMI) dalam pengembalian mereka ke kampung halaman mereka merupakan sebuah tantangan yang kompleks untuk dikaji secara lebih lanjut, khususnya dalam perspektif feminisme Institusional. Pemilihan *framework* ini bertujuan untuk mengkaji lanskap hak-hak individu, kesetaraan berbasis gender, serta semangat untuk

mengimplementasikan *social justice* dalam sistem politik yang hadir (Elias, J., 2010), yang dalam hal ini relevan untuk meneliti proses yang *multifaceted* dalam reintegrasi dalam pemulangan migran Indonesia.

Penelitian yang spesifik membahas reintegrasi purna migran di Indonesia belum banyak. Adapun Setiawati dan Anwar (2024) misalnya, fokus pada implementasi kebijakan khususnya Peraturan BPPMI No. 6 Tahun 2023 namun kurang melihat pengalaman langsung para purna migran. Sementara Setiadi (2001) telah melihat fenomena reintegrasi dari sudut pandang gender namun kurang melihat hambatan sistemik, seperti sulitnya memperoleh akses pelatihan, menyulitkan proses yang dialami purna migran sekembalinya. Terakhir, Yulitanti et al., (2024) melihat strategi reintegrasi di Lombok menggunakan teori struktural-fungsional, namun tidak mampu melihat ketimpangan struktural seperti dampak ketergantungan jangka panjang ekonomi-sosial daerah terhadap remitansi migran. Ketiga artikel ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang membahas reintegrasi secara holistik. Belum ada kajian yang mengintegrasikan analisis kebijakan, perspektif gender, dan ketimpangan struktural. Penggunaan Feminisme Institusional bertujuan untuk melengkapi kesenjangan tersebut.

Ada banyak alasan, baik ekonomi maupun sosial, mengapa, secara global, seorang individu terlibat dalam fenomena migrasi, khususnya dalam mencari kerja. Menurut Yusatirini (2020), individu dapat bermigrasi dalam volume yang lebih besar karena teknologi dan sistem informasi yang meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam kasus Indonesia, kebijakan yang mengatur reintegrasi pekerja ini sangat fokus pada isu-isu ekonomi dalam bentuk bantuan finansial dan pelatihan kewirausahaan, namun memberikan sedikit perhatian pada masalah sosio-psikologis yang dihadapi oleh para purna migran.

Meskipun penelitian telah berfokus pada pertahanan dan hak-hak migran seperti yang hadir pada artikel dari (Budiono et al., 2023; Setiawati & Anwar, 2024), mereka tidak memasukkan kompleksitas yang melibatkan kompleksitas dari migran, khususnya fokus pada gender, dan reintegrasi khususnya bagi perempuan migran. Setiadi (2001) telah mendokumentasikan beberapa kemajuan dalam penelitian yang melibatkan gender dan reintegrasi, dalam hal ini ia menanganinya dari sudut pandang struktural. Namun, penelitian ini mengabaikan hambatan yang dihadapi orang untuk mengaksesnya, keterampilan informal yang dimiliki orang dan pengakuan tersebut, dan stigma sosial yang berbeda yang dialami perempuan. Selain itu, ada orang-orang seperti Yulitanti dkk (2024) yang di Lombok telah meninjau strategi reintegrasi dan memang berkonsentrasi pada aspek struktural-fungsional, namun meninggalkan beberapa sudut sosial budaya dan psikologis reintegrasi dari purna migran.

Riset ini dilaksanakan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang migran perempuan. Artinya, penelitian yang lebih mendalam tentang migrasi perempuan dan reintegrasi dalam parameter yang lebih khusus lagi. Studi ini menggunakan pendekatan Feminis Institusional untuk mengkaji pekerjaan Beranda Migran dalam membantu reintegrasi sosial dan sipil migran perempuan di Indonesia dan mengatasi kesenjangan tersebut. Ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan, memeriksa, dan mengkritik kebijakan maskulin-patriarki seperti BPPMI No. 6 Tahun 2023, dan menunjukkan bagaimana aksi *grassroot* dari Beranda Migran menanggapi kebijakan diskriminatif ini dan menantang struktur gender hegemonik lembaga. Dengan meneliti reintegrasi perempuan migran, penelitian ini membahas kebutuhan untuk membongkar kompleksitas

reintegrasi dan kesenjangan dalam kerangka kerja multidisiplin untuk mengatasi kebutuhan akan kebijakan responsif gender di sektor publik.

Kerangka Teoritis

Permasalahan reintegrasi purna-PMI, terutama purna-PMI perempuan, dapat dijawab dengan melihat bagaimana institusinya menghasilkan program terkait. Feminisme Institusional berasumsi bahwa institusi sebagai sebuah struktur tanpa terelakkan mengalami bias gender (Mackay, 2011). Penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritis Feminisme Institusional untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam reintegrasi purna-PMI perempuan, dan bagaimana upaya-upaya agensi yang dilakukan untuk menanganinya. Feminisme Institusional merupakan perpaduan dari dua perspektif sosial-politik yaitu institusionalisme dan feminisme politik. Keduanya bertemu pada upaya analitiknya untuk memahami interaksi antara aktor dan institusi, mengungkap pembauran antara peraturan formal dan praktik, diskursus dan norma informal; dan menyelidiki dampak konsekuensial dinamika tersebut (Krook & Mackay, 2011). Formal dalam arti ini adalah segala sesuatu yang terlihat dan berwujud seperti program-program institusi, sementara informal adalah aspek-aspek yang tidak terlihat di dalamnya, seperti keberpihakan. Feminisme Institusional memahami patriarki sebagai nilai informal yang terus berinteraksi dengan institusi, menghasilkan keluaran institusional yang bias gender, atau tidak adil gender. Tujuan Feminisme Institusional dalam hal ini adalah mendorong gender sebagai nilai informal untuk reformasi dan perubahan institusional.

Tidak seperti perspektif Institusional biasanya yang cenderung menaruh perhatian pada struktur, Feminisme Institusional membawa semangat Feminisme dengan menaruh perhatian pada agensi. Perempuan, sebagai agensi dalam perspektif Feminisme, memiliki peran sentral di antara pola-pola pembentukan, keberlanjutan, dan perubahan institusi. Feminisme Institusional, dalam bahasan Krook & Mackay, berupaya menjelaskan agensi perempuan tersebut dalam “batasan institusi” (2011:13). Pengalaman subjektif perempuan di dalam institusi, serta yang terdampak institusi, mendapat perhatian yang lebih banyak. Kemudian bagaimana perempuan menanggapi ketidakadilan gender yang disebabkan oleh institusi menjadi perhatian selanjutnya perspektif ini. Mackay (2011:190) menunjukkan agensi perempuan sebagai “aktor institusional” dan “ekstra-institusional.” Maksudnya perempuan sebagai aktor perubahan di dalam institusi, dan bisa juga sebagai aktor di luar institusi yang menyuarakan perubahan tersebut. Berdasarkan kerangka konseptual ini, reintegrasi purna-PMI terlebih dahulu ditinjau secara institusional, sebagai sebuah kebijakan. Selanjutnya pengalaman purna-PMI perempuan menjalani kebijakan tersebut akan ditampilkan dengan menyorot tantangan-tantangannya. Pembahasan dilanjutkan dengan melihat bagaimana peran organisasi non-pemerintah Beranda Migran sebagai aktor ekstra-institusional memperkuat agensi institusional purna-PMI perempuan.

Penelitian ini akan menggunakan konsep 'Feminisme Institusional' dengan mengeksplorasi implikasi gender terkait kebijakan dan program bagi migran, khususnya BPPMI No. 6 Tahun 2023. Implikasi gender potensial akan diuraikan dengan menilai konstruksi kebijakan melalui bahasa, penekanan, dan strukturnya. Misalnya, kebijakan yang dirancang untuk mengatasi stigma sosial, trauma, dan pengakuan keterampilan migran perempuan akan menjadi titik fokus analisis. Secara

praktis, ini akan melibatkan analisis konten kualitatif dari dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan wawancara dengan Ketua Beranda Migran.

Penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi bias gender yang tertanam dalam intervensi negara yang ditujukan kepada purna migran. Operasionalisasi bias gender tercermin dalam sejauh mana kebijakan mengabaikan atau tidak memprioritaskan, kebutuhan spesifik perempuan dalam hal pengakuan keterampilan informal mereka, akses ke sumber daya keuangan, dan program pelatihan yang dilembagakan. Selain itu, penelitian ini mendefinisikan reintegrasi sebagai cara pekerja migran perempuan kembali ke komunitas domisili mereka selama penyelesaian kontrak kerja mereka di luar negeri. Reintegrasi sosial, ekonomi, dan psikososial akan mencakup stigma yang terkait dengan komunitas pekerja migran perempuan, disintegrasi ikatan keluarga, dan keterampilannya yang tidak terlihat secara fisik. Hal ini akan dipastikan melalui narasi pekerja migran perempuan, anggota keluarga, dan perwakilan dari Beranda Migran, serta dokumentasi arsip secara online dan cetak yang berkaitan dengan teori dan praktik reintegrasi.

Peran dari Beranda Migran akan dieksplorasi dalam penelitian ini sebagai kegiatan spesifik yang dilaksanakan dalam mendukung migrasi pekerja perempuan melalui penyelenggaraan kegiatan reintegrasi mereka. Kontribusi organisasi akan didefinisikan dalam konteks advokasi mereka untuk pendekatan berbasis masyarakat, pembentukan KOPPMI (Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia), dan upaya mereka untuk mengalihkan narasi "Pahlawan Devisa". Informasi yang berkaitan dengan hal ini akan ditangkap selama wawancara dengan ketua Beranda Migran.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji peran Beranda Migran dalam reintegrasi migran perempuan yang kembali ke Indonesia dari perspektif feminisme institusional. Menurut Sugiyono (2015), metode kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi dan analisis induktif. Dalam teknik pengumpulan data, metode kualitatif menggunakan berbagai teknik, termasuk wawancara, observasi, library research, dan dokumentasi. Penulis menggunakan wawancara dan *library research* untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kedua metode ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penelitian yang menggunakan kerangka teori Feminisme Institusional, yang menjadi fokus penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang beragam untuk analisis yang lebih komprehensif.

Target wawancara dalam penelitian ini adalah Ketua Beranda Migran yang memiliki pengalaman langsung dalam rancangan program dan implementasi program reintegrasi bagi perempuan migran. Wawancara semi-terstruktur dilakukan pada tanggal 11 Maret 2025 selama 150 menit, dengan fokus pada pengalaman dan tantangan migran dalam reintegrasi, bentuk pendampingan dan program yang dikembangkan oleh Beranda Migran, keterbatasan sumber daya operasional dan organisasi, serta umpan balik tentang kebijakan migrasi oleh negara dan peran perempuan dalam proses reintegrasi. Wawancara dilakukan dengan persetujuan responden, direkam secara digital, dan kemudian ditranskripsikan kata demi kata untuk melindungi keaslian informasi yang dikumpulkan. Data yang diperoleh dari wawancara dilengkapi dengan studi kepustakaan yang ekstensif termasuk dokumen kebijakan migrasi Indonesia (UU No. 18 Tahun

2017, laporan BP2MI), publikasi dan laporan Program Beranda Migran, serta literatur ilmiah tentang feminisme institusional, migrasi perempuan, dan reintegrasi migran dari jurnal nasional dan internasional.

Data dianalisis secara tematik melalui tiga tahap: pertama ialah reinterpretasi untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dari transkrip wawancara dan dokumen, kedua *mind-map* lanjutan untuk menghubungkan tema dengan konsep feminisme institusional, khususnya teori sudut pandang perempuan, kritik terhadap lembaga negara yang maskulin, dan peran masyarakat sipil dalam memperkuat purna migran, terakhir adalah elaborasi interpretatif kritis tentang bagaimana Beranda Migran berfungsi sebagai lembaga alternatif yang responsif terhadap tuntutan perempuan.

Hasil Penelitian

Data kualitatif yang dikombinasikan dengan perspektif feminisme institusional telah menunjukkan kelemahan dari pendekatan pemerintah terhadap reintegrasi pekerja perempuan purna migran. Mengingat data Bank Dunia tahun 2024 dan hasil wawancara dengan beranda migran tahun 2025, laporan PMI dan Integrasi Reintegrasi Migran mencerminkan bagaimana lembaga negara memiliki pendekatan 'one-fits all' dan, mengacu pada artikel BPPMI No.6 tahun 2023, sangat dipengaruhi oleh pendekatan maskulin dan mengabaikan masalah kompleks mengenai perempuan yang kembali (Kristy, 2025). Dari sudut pandang kelembagaan ini, purna migran dianggap memiliki modal, tetapi tidak dipandang memiliki keterampilan yang relevan untuk mengelolanya, yang telah menghasilkan penekanan yang tidak proporsional dalam program kewirausahaan dan manajemen keuangan. Pendekatan ini mengabaikan persyaratan tambahan dari struktur kelembagaan. Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah yang memberikan hambatan praktis dengan membatasi program tersebut untuk pekerja migran yang kembali kurang dari 50 tahun dan mereka yang telah berada di Indonesia selama 3 tahun atau kurang. Ini secara efektif mengecualikan sejumlah besar perempuan, yang seringkali menambah waktu yang dihabiskan di luar negeri untuk mencapai tujuan finansial keluarga mereka..

Masalah yang dihadapi selama reintegrasi oleh perempuan purna migran tidak hanya mencakup aspek keuangan tetapi juga dampak psiko-sosial dan struktural yang mengakar, yang sering diabaikan. Sementara banyak orang yang kembali menghadapi keterasingan dan stigma sosial yang cukup besar di komunitas asal mereka, mereka dicap gagal sosial karena tidak memiliki kekayaan yang cukup besar (Hugo 2012; Kristy 2025). Bergantung pada proses psiko-sosial, perpisahan yang panjang sering menyebabkan keretakan dalam keluarga dan anak-anak yang tertinggal seringkali lebih stres dan cemas (UNICEF 2024; Al-Azzeh dan Diab 2025). Hal ini terjadi, karena, misalnya, pengiriman uang untuk rumah dan dana lainnya tidak membantu memperbaiki kerugian emosional. Secara ekonomi, para pekerja migran yang kembali menghadapi tantangan karena keterampilan kejuruan dan sertifikasi (seperti bahasa, memasak, dll.) yang diperoleh di luar negeri seringkali tidak diakui, dan tidak memenuhi syarat di Indonesia (Kristy, 2025).

Mengingat keterbatasan negara, Beranda Migran bertindak sebagai lembaga pengganti yang memanfaatkan model ekstra-kelembagaan, akar rumput (*grassroot*), dan partisipatif yang ditujukan untuk, dan mencapai reintegrasi yang komprehensif (Kristy, 2025). Salah satu hasil yang paling menonjol dari model ini adalah munculnya KOPPMI (Koordinasi Purna Pekerja Migran

Indonesia) di wilayah-wilayah yang memiliki kuantitas banyak purna migran, seperti Cilacap dan Yogyakarta, sebuah manifestasi dari apa yang dia sebut sebagai "lembaga strategis" yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan sosial dan politik para pekerja migran yang kembali. Beranda Migran melakukan apa yang dapat disebut sosialisasi politik karena membantu purna-PMI secara kritis menganalisis isu-isu seperti proyek strategis nasional khususnya menumbuhkan kesadaran akan hak-hak mereka. Selain itu, organisasi ini beroperasi dengan premis non-diskriminasi, memberikan bantuan dan layanan terlepas dari status hukum migran (terdokumentasi atau tidak berdokumen) karena mereka percaya bahwa perlindungan, sebagai kewajiban negara, adalah hak konstitusional yang harus diberikan kepada semua warga negara Indonesia, terlepas dari kepatuhan terhadap aturan (Kristy 2025).

Studi menunjukkan bahwa proses reintegrasi yang berhasil perlu mencakup fokus aktor yang terlibat untuk menjadi inklusif gender dan mempertimbangkan elemen struktural dan psikososial yang melampaui fokus terbatas negara pada ekonomi. Beranda Migran melakukan banyak pekerjaan dalam upaya membongkar retorika negara, terutama bertujuan untuk membongkar label 'Pahlawan Devisa'. Narasi ini dipandang dalam literatur sebagai sarana untuk mempertahankan komodifikasi pekerja migran dan karena kurangnya intervensi negara serta terbatasnya perlindungan hak-hak pekerja migran.

Pembahasan

Tantangan Reintegrasi

Proses reintegrasi bagi para purna-migran di Indonesia merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek sistemik, struktural, dan sosial yang saling terkait. Analisis mengenai peran Beranda Migran dalam mendampingi proses reintegrasi, mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang dihadapi para purna-migran, terutama perempuan, serta tantangan bagi Beranda Migran sebagai organisasi pendamping dalam membantu mereka kembali dan beradaptasi dengan masyarakat setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Akan tetapi, dalam menjalani proses pendampingan tersebut, Beranda Migran juga harus berhadapan dengan tantangan yang berasal dari kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan bias gender dan diskriminasi institusional yang masih mempengaruhi program-program reintegrasi purna-migran di Indonesia.

Program reintegrasi yang diadakan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan adanya bias gender yang bersifat sistemik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPPMI No. 6 Tahun 2023. Kebijakan ini cenderung menilai "keberhasilan" hanya dari aspek ekonomi, tanpa mempertimbangkan kendala struktural yang dihadapi oleh perempuan purna-migran. Fokus dari program adalah pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan, dengan asumsi bahwa para purna-migran memiliki dana yang cukup tetapi kekurangan pengetahuan dalam pengelolaannya. Pendekatan ini mencerminkan perspektif maskulin terhadap migrasi yang mengabaikan kondisi rumit yang dihadapi perempuan purna-migran. Selain itu, terdapat batasan waktu akses program maksimum tiga tahun dan batasan usia maksimum 50 tahun, meskipun banyak perempuan yang terus bekerja dan memaksimalkan waktu bekerja di luar negeri untuk mendanai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan lainnya. Keterampilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri sering kali tidak diakui, meskipun mereka menguasai berbagai keahlian seperti keahlian bahasa asing, memasak, dan *baking*.

Pendekatan reintegrasi yang terlalu menekankan pada aspek ekonomi dapat memperkuat marginalisasi perempuan purna-migran. Silvey (2006) dan Hugo (2012) mengungkapkan bahwa kebijakan migrasi di Indonesia sering kali mengabaikan pengalaman unik perempuan, termasuk beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Program reintegrasi yang hanya menyediakan pelatihan kewirausahaan tanpa mempertimbangkan diskriminasi gender dan pembatasan akses sumber daya akan mempersempit peluang perempuan (Silvey, 2006; Hugo, 2012). Selain itu, batasan usia program menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan perempuan migran yang kembali saat berusia di atas 50 tahun. Pengakuan terhadap keterampilan informal yang diperoleh selama bekerja di luar negeri juga sangat minim, yang dapat menghambat kepercayaan diri dan kesempatan kerja. Kebijakan harus lebih inklusif dengan pendekatan yang mempertimbangkan gender agar perempuan purna-migran tidak terpinggirkan setelah kembali ke tanah air (ILO, 2017; IOM, 2019). Keterbatasan dan sikap bias dalam program pemerintah ini semakin memperumit proses reintegrasi, karena tantangan yang dihadapi oleh purna-migran, khususnya perempuan, tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup persoalan sosial dan stigma yang melekat dalam masyarakat.

Proses reintegrasi bagi purna-migran di Indonesia tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi, tetapi juga melibatkan berbagai masalah lain yang lebih kompleks. Ketika mereka kembali ke tanah air, mereka mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan disebabkan oleh faktor usia, keterampilan yang kurang diakui, stigma sosial di masyarakat, dan tingkat pendidikan yang rendah. Banyak pekerja migran yang hanya memiliki pendidikan setingkat SMA, SMP, atau SD, yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan formal. Pekerja migran perempuan menghadapi tantangan yang lebih besar karena mereka biasanya bekerja di sektor informal dan domestik. Mereka mengirim uang untuk kebutuhan keluarga, terutama untuk makanan, pendidikan, dan kesehatan anak, yang memaksa mereka untuk bekerja lebih lama di luar negeri. Alokasi remitansi terbesar dari pekerja migran perempuan umumnya digunakan untuk makanan keluarga di Indonesia, diikuti oleh pengeluaran untuk biaya pendidikan dan perawatan kesehatan anak, yang mengakibatkan mereka terpaksa memperpanjang masa kerja di luar negeri.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa masalah reintegrasi purna-migran berhubungan dengan konteks struktural dan sosial. Kesulitan mereka dalam mencari pekerjaan setelah kembali ke Indonesia tidak hanya bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, tetapi juga oleh sistem perekrutan yang tidak menghargai pengalaman kerja di luar negeri. Menurut penelitian Ford et al., (2012), banyak perusahaan di Indonesia kurang menghargai pengalaman kerja di sektor informal, sehingga sulit bagi purna-migran, terutama perempuan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Ford et al., 2012). Stigma sosial terhadap pekerja migran, terutama perempuan, memperburuk reintegrasi. Mereka sering dinilai gagal jika kembali tanpa kekayaan materi, meskipun remitansi yang mereka kirim membantu ekonomi keluarga. Stigma ini menurunkan rasa percaya diri dan menciptakan rasa terasing, sehingga memperlambat proses adaptasi mereka (Hugo, 2012). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh IOM (2019) mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi sering memaksa perempuan purna-migran untuk kembali bekerja ke luar negeri dalam siklus migrasi yang berulang. Sebagian besar remitansi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukannya untuk investasi produktif, karena adanya keterbatasan akses dan literasi keuangan yang terbatas. Selain tantangan ekonomi dan stigma sosial yang dihadapi, proses reintegrasi purna-migran perempuan

juga berdampak signifikan pada aspek psiko-sosial, terutama dalam hubungan keluarga yang sering kali mengalami keretakan akibat lamanya masa tinggal di luar negeri.

Migrasi yang dilakukan oleh perempuan sering kali mengakibatkan keretakan dalam hubungan keluarga, terutama dengan anak-anak yang ditinggalkan saat masih kecil. Banyak ibu migran yang meninggalkan anak-anak mereka di saat mereka masih terlalu muda untuk mengenali sosok ibunya, sehingga ketika mereka kembali, ikatan antara ibu dan anak telah melemah bahkan hilang sepenuhnya. Dalam beberapa kasus yang ekstrem, terdapat anak yang sampai mengusir ibunya ketika tidak lagi menerima kiriman setelah kepulangan sang ibu. Penelitian yang dilakukan bersama antara Beranda Migran dengan Universitas Alberta, Kanada, menunjukkan bahwa pekerja migran yang memiliki anak yang bersekolah tinggi cenderung bekerja lebih lama di luar negeri. Setelah kembali pada usia 50-an, mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di Indonesia. Usaha untuk memberikan kompensasi dalam bentuk materi seperti uang atau rumah tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional dan membangun kembali ikatan emosional antara ibu dan anak yang telah lama hilang.

Migrasi perempuan yang meninggalkan anak-anak selama masa penting pertumbuhan mereka menyebabkan tekanan emosional dan dampak psikologis yang mendalam bagi anak-anak. Menurut (Al-Azzeh & Diab, 2024) ketidakhadiran ibu dapat menimbulkan perasaan kehilangan, kegelisahan, dan kesulitan dalam hubungan. Keterbatasan komunikasi selama periode migrasi memperburuk kondisi ini, membuat ikatan ibu-anak menjadi rapuh, bahkan saat ibu kembali. Berdasarkan laporan dari UNICEF (2024), anak-anak yang tidak ditemani ibu mereka menunjukkan stres dan kecemasan yang lebih tinggi, yang memengaruhi prestasi akademik dan hubungan sosial mereka. Kompensasi finansial tidak dapat menggantikan kebutuhan emosional anak-anak, sehingga perlu pendekatan reintegrasi yang memperhatikan aspek psikososial tersebut (UNICEF, 2024). Pekerja migran perempuan yang kembali pada usia 50-an juga menghadapi tantangan adaptasi, dengan penelitian dari World Bank (2024) menunjukkan bahwa tantangan-tantangan seperti perubahan teknologi dan kurangnya pelatihan, dan kurangnya dukungan psikososial mengarah pada perasaan terisolasi dan hambatan dalam berkontribusi di masyarakat. Dengan demikian, reintegrasi perempuan purna-migran harus dirancang secara holistik, dengan mempertimbangkan ikatan keluarga secara ekonomi dan memperkuat ikatan emosional dan mendukung kebutuhan psikososial. Pendekatan ini penting untuk memulihkan hubungan ibu-anak serta membantu perempuan beradaptasi dengan perubahan saat mereka kembali.

Kondisi ini mencerminkan bahwa permasalahan reintegrasi purna-migran perempuan tidak hanya bersifat personal dan emosional, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan pendekatan institusional pemerintah yang kurang memperhatikan aspek sosial dan psikologis dalam proses pemulihan hubungan keluarga. Pendekatan institusional pemerintah di Indonesia memiliki beberapa kelemahan dalam mengelola reintegrasi bagi migran, terfokus terutama pada aspek ekonomi dan pelatihan kewirausahaan, sementara aspek sosial, psikologis, dan politik sering terabaikan. Beranda Migran hadir sebagai lembaga alternatif, dengan pendekatan multidimensi untuk melengkapi kekurangan layanan pemerintah dan melawan norma patriarki yang terinstitusionalisasi dalam kebijakan migrasi. Organisasi ini memprioritaskan pemberdayaan berbasis komunitas dan mendukung purna-migran melalui konsultasi serta membentuk organisasi akar rumput seperti KOPMI (Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia). Beranda Migran

berusaha menempatkan perempuan sebagai subjek dalam kebijakan serta mendorong adanya reformasi struktural untuk mengatasi diskriminasi dalam program reintegrasi.

Keterbatasan pendekatan pemerintah Indonesia dalam reintegrasi migran, terutama perempuan, telah mendapat perhatian dari banyak penelitian. IOM (2023) dan UN Women (2024) menunjukkan bahwa fokus pada pelatihan ekonomi sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan purna-migran. Perempuan purna-migran sering mengalami trauma dan stigma sosial yang tidak ditangani oleh program pemerintah yang terlalu berfokus pada aspek teknis. Temuan dari World Bank (2024) menegaskan bahwa fokus pada aspek ekonomi memperdalam ketidaksetaraan gender (World Bank, 2024). Sebagai organisasi masyarakat sipil, Beranda Migran berupaya menawarkan pendekatan yang lebih holistik, dengan memberikan dukungan, konsultasi, dan ruang aman untuk berbagi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi UN Women (2024), yang menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas dan inklusi perempuan sebagai aktor utama. Organisasi akar rumput seperti KOPMI turut berkontribusi dalam memperkuat suara purna-migran. Beranda Migran dan inisiatif serupa memainkan peran penting untuk mendukung reintegrasi yang adil dan inklusif bagi perempuan. Sebagai respons atas keterbatasan pendekatan pemerintah, peran organisasi masyarakat sipil menjadi sangat krusial dalam menyediakan solusi yang lebih partisipatif dan berfokus pada pengalaman para purna-migran.

Pendampingan Pembentukan Civil Society

Jawaban Beranda Migran atas tantangan-tantangan yang dipetakan sebelumnya adalah menguatkan agensi purna-PMI. Penguatan agensi dilakukan dengan membantu pengorganisasian dan pendidikan sosial-politik purna-PMI (Kristy, 2025). Salah satu hasil konkret dari proses ini adalah terbentuknya KOPPMI (Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia) di Cilacap dan Yogyakarta. KOPPMI memiliki peran yang unik dari organisasi-organisasi buruh migran lain karena fokus spesifiknya pada purna-PMI, sementara kebanyakan lainnya mencakup PMI secara umum (baik yang sedang, tidak, atau pensiun bekerja). Bagi para purna-PMI, KOPPMI dibentuk untuk menjadi wadah penguatan kapasitas sosial-politik mereka. Cilacap dan Yogyakarta terpilih melalui proses imersi, diskusi, dan konsultasi antara Beranda Migran dengan purna-PMI di daerah kantong migran sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta. Cilacap dan Yogyakarta dinilai lebih siap, berdasarkan pemahaman dan kesadaran politik yang lebih maju dibanding daerah lain. Pembentukan *civil society* purna-Migran ini dalam Feminisme Institusional merupakan bentuk “agensi strategis” (Mackay, 2011, 191). Strategis karena melibatkan aktor dalam (purna-Migran) dan aktor luar (Beranda Migran) untuk menghasilkan institusi informal.

Solusi *civil society* sebagai institusi informal merupakan pilihan yang krusial. Pahalanya nilai informal tidak dapat disebarluaskan jika sebelumnya tidak ada perspektif yang jelas. Perspektif para purna-PMI awalnya cenderung terfragmentasi, selain karena pengalaman kedaerahan yang beragam, pengalaman personalnya juga berbeda-beda. Pembentukan *civil society* membantu mengarahkan suara-suara keresahan tersebut menjadi satu kekuatan. Beranda Migran dalam hal ini berperan sebagai, meminjam istilah Institusionalisme dari Schickler (2001), ‘wirausahawan’ institusional (*institutional entrepreneurs*). Peran-peran sebuah aktor ‘wirausahawan’ institusional melingkupi mobilisasi agensi, pembersihan isu, membangun koalisi, mencari celah kesenjangan dalam lingkungan institusional dan akhirnya menghasilkan inovasi, reformasi, maupun

rekonstruksi institusi. Beranda Migran melakukan peran-peran tersebut namun posisi mereka sebagai aktor ekstra-institusional, di luar institusi reintegrasi purna-PMI, menjadi batasan. Pembentukan *civil society* yang diinisiasi aktor dari dalam institusi, yaitu purna-PMI, diperlukan untuk mendorong perubahan dari dalam. Kehadiran dua aktor ini diperlukan karena menurut Mackay (2011, 191) perubahan institusi bukan produk dari satu desainer saja, tapi terkonseptualisasikan sebagai tuntutan bersama dari banyak kepentingan, bahkan terkadang saling silang.

Kesadaran politik menjadi aspek penting yang perlu dimiliki oleh purna-migran karena ia membuka ruang bagi mereka untuk memahami, mengkritisi, dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Migrasi turut mengubah norma-norma sosial terkait partisipasi politik masing-masing purna-PMI, sementara hal itu juga dapat meningkatkan pemahaman tentang institusi politik yang lebih berkualitas (Batista et al., 2019). Beranda Migran menekankan bahwa banyak purna-migran, terutama di daerah seperti Cilacap, mulai menunjukkan kemajuan dalam kesadaran politik, yang tercermin dari keterlibatan mereka dalam diskusi isu-isu strategis seperti perubahan iklim, proyek nasional, hingga hak atas layanan sosial (Krisy, 2025). Kesadaran ini tidak hanya memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi negara, tetapi juga mendorong mereka untuk membentuk organisasi kolektif yang mampu menyuarakan kepentingan komunitasnya. Tanpa kesadaran politik, purna-migran rentan terjebak dalam posisi pasif, menerima kebijakan yang tidak berpihak, dan sulit mengakses hak-hak dasar seperti jaminan sosial, pendidikan, atau layanan kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan politik yang dilakukan secara kontekstual dan partisipatif, seperti yang difasilitasi oleh Beranda Migran, menjadi kunci dalam membangun *civil society* yang kritis, mandiri, dan berdaya.

Solusi *civil society* berbasis purna-migran menjadi pendekatan strategis dalam memusatkan pengalaman migrasi balik (*return migration*) sebagai sumber pengetahuan, kekuatan kolektif, dan arah perubahan sosial. Migrasi balik, khususnya reintegrasi, memang seharusnya berupa partisipasi aktif purna-PMI dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik negara asal (Wickramasekara, 2019). Pendekatan ini menempatkan purna-migran bukan sekadar sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang aktif membentuk narasi dan solusi atas tantangan reintegrasi. Dalam praktik Beranda Migran, hal ini tercermin dari fasilitasi pembentukan KOPPMI dan berbagai forum diskusi yang mengangkat pengalaman migrasi sebagai dasar penyusunan strategi komunitas (Kristy, 2025). Dengan mengorganisir diri, purna-migran dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka secara lebih tepat, membangun solidaritas lintas wilayah, serta memperjuangkan pengakuan atas keterampilan dan hak-hak mereka yang selama ini terpinggirkan. Pendekatan ini juga memungkinkan munculnya model-model lokal yang kontekstual dan replikatif, seperti yang dilakukan di Cilacap dan Jogja. Dengan demikian, *civil society* berbasis purna-migran bukan hanya menjadi ruang advokasi, tetapi juga laboratorium sosial yang mengembangkan praktik-praktik reintegrasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Konsep *centering-decentering* menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana pengalaman migrasi balik dapat dijadikan pusat dalam pembangunan *civil society* purna-migran. *Centering* merujuk pada upaya untuk menempatkan pengalaman, suara, dan perspektif purna-migran sebagai titik tolak dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan praktik pendampingan. Sebaliknya, *decentering* berarti menggeser dominasi narasi dari aktor-aktor eksternal—seperti negara,

donor, atau LSM besar, yang sering kali memaksakan agenda dari luar tanpa memahami konteks lokal. Upaya ini ditujukan untuk membentuk apa yang disebut McGarry (2024) sebagai 'ekspresi demokratis.' Dalam praktik Beranda Migran, pendekatan ini tampak jelas melalui metode imersi, diskusi horizontal, dan fasilitasi organisasi seperti KOPPMI, di mana purna-migran tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penggerak utama. Dengan memusatkan pengalaman migrasi balik, Beranda Migran tidak hanya membangun solidaritas berbasis pengalaman bersama, tetapi juga menciptakan ruang politik baru di mana purna-migran dapat menegosiasikan identitas, hak, dan masa depan mereka secara kolektif. Pendekatan ini menantang logika top-down dan membuka jalan bagi transformasi sosial yang lebih adil dan berakar pada pengalaman nyata komunitas migran.

Solusi civil society berbasis purna-migran juga berperan penting dalam menyusun subjektivitas program reintegrasi, yakni dengan menggeser fokus dari pendekatan teknokratis ke pendekatan yang berakar pada pengalaman dan aspirasi individu purna-migran itu sendiri. Dalam konteks ini, subjektivitas tidak hanya dimaknai sebagai identitas personal, tetapi juga sebagai posisi sosial-politik yang terbentuk melalui pengalaman migrasi dan kepulangan. Beranda Migran, melalui praktik-praktik seperti imersi, diskusi kelompok, dan pelibatan purna-migran sebagai pendamping kasus, membuka ruang bagi mereka untuk merefleksikan pengalaman, mengartikulasikan kebutuhan, dan merumuskan bentuk reintegrasi yang sesuai dengan realitas hidup mereka. Hal ini menjadi penting karena program-program reintegrasi yang dirancang negara sering kali bersifat seragam, berbasis asumsi ekonomi, dan tidak mempertimbangkan kompleksitas pengalaman migrasi balik, seperti trauma, relasi keluarga yang berubah, hingga stigma sosial. Dengan memfasilitasi penyusunan subjektivitas ini, civil society tidak hanya memperkuat agensi purna-migran, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif, adil, dan manusiawi.

Beranda Migran sebagai Alternatif Lembaga dari Non-Pemerintah

Kritik penanganan purna migran, antara NGO dan pemerintah beda. Pemerintah cenderung tidak pandang bulu, rata semua kebijakannya ga peduli kompleksitas masalah purna migran. Keterbatasan paradigma ekonomi-sentris menjadi kritik utama terhadap pendekatan pemerintah dalam menangani reintegrasi purna-migran. Beranda Migran mengidentifikasi bahwa program pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPPMI No. 6 Tahun 2003, menerapkan pendekatan "one-size-fits-all" yang mengabaikan kompleksitas multidimensional yang dihadapi purna-migran perempuan.

Bias maskulin dalam perancangan kebijakan tercermin dari fokus program pemerintah pada pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan, dengan asumsi bahwa purna-migran memiliki modal cukup namun kurang pengetahuan finansial. Pendekatan ini mengabaikan realitas bahwa mayoritas purna-migran perempuan menghadapi tantangan struktural yang lebih kompleks seperti stigma sosial, keretakan hubungan keluarga, trauma psikologis, dan non-recognition terhadap keterampilan yang diperoleh selama migrasi.

Menurut laporan Beranda Migran, dari Forum Konsolidasi Purna Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2023, permasalahan purna migran di Indonesia masih belum bisa terpenuhi oleh kebijakan-kebijakan dari Pemerintah. Beranda Migran disini, tidak menjadi organisasi yang menggantikan peran pemerintah, namun karena pemerintah yang pendekatannya cenderung tidak

memperhatikan hak-hak perempuan esensial lainnya (Migran, 2023). permasalahan yang dinamis ini menjadi poin program-program dari Beranda Migran dalam implementasi programnya..

Pendekatan grassroots dan partisipatif menjadi pembeda utama Beranda Migran dari institusi formal pemerintah. Organisasi ini tidak hanya berperan sebagai service provider, melainkan sebagai fasilitator pemberdayaan politik yang menempatkan purna-migran sebagai subjek aktif dalam merumuskan solusi atas permasalahan mereka sendiri.

Dekonstruksi narasi "Pahlawan Devisa" merupakan kontribusi kritis Beranda Migran dalam menantang wacana dominan yang melanggengkan komodifikasi PMI. Melalui pendekatan feminisme institusional, organisasi ini mengkritisi bagaimana narasi heroik tersebut justru mengaburkan eksploitasi struktural yang dialami PMI perempuan dan membenarkan minimnya perlindungan negara. Akan tetapi, di balik kontribusi kritis tersebut, Beranda Migran juga dihadapkan pada berbagai tantangan operasional dan keterbatasan sumber daya yang memengaruhi efektivitas kerja mereka di lapangan.

Tantangan Operasional dan Keterbatasan Sumber Daya

Beranda Migran menghadapi berbagai sejumlah masalah dalam operasional serta menghadapi kekurangan sumber daya. Mereka mengalami kesulitan menjangkau purna-migran di berbagai daerah seperti Jogja dan Cilacap karena permasalahan transportasi dan yang cukup jauh. Di Jogja, keadaan yang sulit menjadikan outreach menjadi tantangan, sementara di Cilacap, jarak juga menjadi hambatan dalam monitoring harian. Meskipun demikian, penggunaan grup komunikasi sangat mempermudah koordinasi. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda; purna-migran di Cilacap cenderung lebih militan, aktif dan terlibat dalam kegiatan politik dan organisasi, sedangkan di Jogja, mereka lebih membutuhkan pelayanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan. Di sisi lain, terdapat ekspektasi keliru dari purna-migran yang melihat Beranda Migran sebagai lembaga yang memberikan bantuan finansial. Pandangan ini timbul dari pengalaman mereka dengan program pemerintah atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bersifat *charity*. Beranda Migran perlu memberikan edukasi yang komprehensif untuk mengubah pandangan ini menjadi pemahaman tentang pemberdayaan dan pengorganisasian.

Selain menghadapi kesulitan dalam menjangkau dan mengedukasi purna-migran di berbagai daerah, Beranda Migran juga harus menghadapi keterbatasan finansial yang memengaruhi keberlanjutan program dan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan struktural dalam jangka panjang. Tantangan selanjutnya yang dihadapi Beranda Migran sebagai sebuah lembaga adalah keterbatasan finansial yang terbatas. Sumber pembiayaan mereka tergantung pada sumber yang beragam dan proyek tertentu, seperti dukungan dari *United Methodist Church* pada tahap awal pembentukannya dan kolaborasi dengan lembaga swadaya lainnya seperti Dompot Dhuafa untuk kasus khusus, misalnya korban penipuan yang terjadi di Filipina dan Kamboja. Pendanaan yang berbasis proyek menciptakan ketidakpastian dan menghalangi kemampuan mereka dalam melakukan perubahan struktural jangka panjang yang dibutuhkan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa reintegrasi perempuan purna-migran di Indonesia tetap menjadi isu kompleks yang tidak cukup ditangani oleh kebijakan pemerintah, yang sebagian besar berfokus pada aspek ekonomi dan sering mengabaikan tantangan gender yang dihadapi perempuan ini. Analisis peran Beranda Migran dalam reintegrasi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif akar rumput organisasi sangat penting dalam mengatasi hambatan sosial, psikologis, dan struktural yang dihadapi perempuan sekembalinya mereka di tanah air. Dengan mendekonstruksi narasi "Pahlawan Devisa" dan berfokus pada pemberdayaan, Beranda Migran memberikan pendekatan yang lebih holistik yang melampaui pertimbangan finansial dan ekonomi yang ditekankan oleh pemerintah.

Temuan ini menggarisbawahi perlunya kebijakan reintegrasi yang lebih responsif gender yang mempertimbangkan spektrum penuh tantangan yang dihadapi oleh perempuan purna-migran, termasuk stigma sosial, trauma psikologis, dan kurangnya pengakuan untuk keterampilan informal. Penelitian ini menyoroti pentingnya organisasi masyarakat sipil, seperti Beranda Migran, dalam mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh inisiatif pemerintah, memastikan bahwa proses reintegrasi bersifat inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan. Untuk reintegrasi yang efektif, kebijakan masa depan harus mengadopsi kerangka kerja yang lebih komprehensif yang mengakui sifat interseksional migrasi, dengan fokus pada kesetaraan gender, keadilan sosial, dan solusi berbasis masyarakat (*grassroot*).

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung jalannya penelitian akan reintegrasi purna migran ini. Pertama penulis sampaikan terimakasih banyak kepada dosen mata kuliah aksi humaniter yaitu mbak Atin Prabandari Ph.d yang mana tidak kenal lelah selalu mendorong para penulis untuk menuliskan ide-ide ilmiahnya kedalam ranah humanitarianism. Tanpa dukungan dan bimbingan beliau, penulis rasa akan kesulitan dalam mengelaborasi pemikiran-pemikiran penulis dalam artikel riset ini. Kedua, penulis sampaikan terimakasih kepada Beranda Migran, khususnya Mbak Hani, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada riset ini. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman penulis yang juga selalu aktif memberikan masukan dan komentar guna memperdalam argumentasi dalam riset ini, khususnya juga kepada para tutor kelas Aksi Humaniter yang juga selalu membantu penulis dalam aspek-aspek kepenulisan.

Referensi

- Alunaza, H., Mentari, M., & Lutfie, R. (2022). Perlindungan terhadap pekerja migran indonesia di masa pandemi covid-19 dari perspektif politik dan hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 64-78. <https://doi.org/10.31571/pkn.v6i1.3375>
- Anggriani, R. (2017). Perlindungan hukum bagi irregular migrant workers indonesia di kawasan asia tenggara (dalam perspektif hukum ham internasional). *Yuridika*, 32(2), 308. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4773>
- Atedjadi, R. (2015). Peran dan tanggung jawab lembaga pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran di indonesia. *Veritas Et Justitia*, 1(2). <https://doi.org/10.25123/vej.1693>
- Ayunda, R., Yusuf, R., & Disemadi, H. (2021). Efektivitas kebijakan pemerintah tentang perlindungan sosial pekerja migran indonesia: studi hukum di provinsi kepulauan riau. *Justisi*, 7(2), 89-104. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1248>
- Budiono, A., Bangsawan, M., Wardiono, K., Sukoco, B., Diarti, D., & Rumiati, N. (2023). Penyuluhan tentang problematika dan perlindungan hukum pekerja migran indonesia di hongkong. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 230-241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.30158>
- Fikri, S. (2022). Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pekerja migran indonesia di luar negeri. *Morality Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 108. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255>
- Ford, M., Lyons, L., & van Schendel, W. (2012). *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspectives*. Routledge.
- Hamdi, S., Syarifuddin, S., Indrasari, O., & Erlina, E. (2022). Strategi pemerintah membantu pekerja migran dalam mengatasi dampak covid-19 di suralaga, lombok timur. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 185-198. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.289>
- Hugo, G. (2012). Migration and Development in Indonesia. *Asian and Pacific Migration Journal*, 21(3), 291-314.
- International Labour Organization (ILO). (2017). *Return and Reintegration of Migrant Workers: Challenges and Good Practices*.
- International Organization for Migration (IOM). (2019). *Recognition of Skills Acquired by Migrant Workers Abroad*. <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/documents/IOM-Global-Report-2019-Operations-and-Emergencies.pdf>
- International Organization for Migration (IOM). (2019). *Remittances and the Indonesian Economy: Policy and Practice*. <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/documents/IOM-Global-Report-2019-Operations-and-Emergencies.pdf>
- International Organization for Migration (IOM). (2023). *Reintegration of Returning Migrants: Challenges and Good Practices in Indonesia*.
- Iqbal, M. (2020). Apakah pekerja migran indonesia sehat mental?. *Jurnal Kajian Wilayah*, 10(2), 65. <https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.825>
- Khasanah, D., Khanifa, N., & Rizkiana, R. (2023). Analisis yuridis undang-undang nomor 18 tahun 2017 terhadap pelaksanaan desmigratif. *Integralistik*, 34(1), 20-32. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v34i1.40200>

- Matompo, O. and Izziyana, W. (2022). Perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan indonesia non prosedural di saudi arabia berdasarkan hak konstitusional warga negara. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 17(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i2.18282>
- Al-Azzeh, D., & Diab, J. L. (2024). Psychological impacts of maternal migration on left-behind children: A cross-cultural review. *Frontiers in Psychology*, 15, Article 1407733. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1407733>
- Prabowo, A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran indonesia di jawa timur. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 1(2), 91-107. <https://doi.org/10.20473/jgar.v1i2.39223>
- Rahmadhani, S., Fauzi, R., & Nulhaqim, S. (2023). Peran pekerja sosial dalam perlindungan bagi pekerja migran. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.40243>
- Rosalina, H. and Setyawanta, L. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran sektor informal dalam perspektif teori bekerjanya hukum di masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174-187. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>
- Silvey, R. (2006). "Geographies of Gender and Migration: Spatializing Social Difference." *International Migration Review*, 40(1), 64-81. <https://www.jstor.org/stable/27645579>
- Silviana, S., Sood, M., & Makhroja, M. (2022). Analisis implementasi sistem sponsorship (kafala) terhadap pelanggaran hak pekerja migran indonesia di saudia arabia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(2), 96-109. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i2.65>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UN Women. (2024). Towards Gender-Responsive Reintegration of Women Migrant Workers in Southeast Asia.
- UNICEF. (2024). The Emotional Well-being of Children Left Behind by Migrant Parents. UNICEF Report.
- Widodo, H. and Belgradoputra, R. (2019). Perlindungan pekerja migran indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107-116. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/343>
- World Bank. (2024). Challenges of Reintegration for Female Migrant Workers in Indonesia. World Bank Policy Brief.
- World Bank. (2024). Female Migrant Workers and Structural Barriers in Reintegration Policies.
- Wuryandari, R. (2022). Perspektif sound governance dalam tata kelola penempatan pekerja migran indonesia: kasus pekerja perempuan domestic worker. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(2), 82-101. <https://doi.org/10.20473/jgar.v2i2.33465>
- Yusitarani, S. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24-37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>

Wawancara

Kristy, H. (2025, Maret 15). Beranda Migran. *Wawancara*. Sleman.